

PERKEMBANGAN SISTEM KEPARTAIAN YANG TERFRAGMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPRESENTASI RAKYAT DI INDONESIA

¹Diva Elvina, ²Muhammad Rayhan Ibrahim, ³Syauqi Hayyan Azizy, ⁴Rudi Santoso

^{1,2,3&4}Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung

Email: ¹divaelvina69@gmail.com, ²mrayhanib123@gmail.com

³syauqihayyan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perkembangan sistem kepartaian yang terfragmentasi di Indonesia pascareformasi 1998 serta dampaknya terhadap kualitas representasi rakyat dalam sistem demokrasi. Sistem multipartai telah meningkatkan partisipasi politik dan memperluas representasi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan fragmentasi politik di parlemen yang memengaruhi stabilitas pemerintahan dan efektivitas pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem kepartaian serta pengaruhnya terhadap representasi politik dan efektivitas pemerintahan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal, buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan hasil pemilu yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multipartai memperluas ruang representasi politik, namun juga memunculkan koalisi pragmatis, melemahnya ideologi partai, serta dominasi elite politik. Fragmentasi partai politik menyebabkan proses legislasi dan pengambilan kebijakan menjadi lebih kompleks sehingga berdampak pada efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi representatif di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Kepartaian; Fragmentasi Politik; Multipartai; Representasi Rakyat; Demokrasi

Abstrack

This study examines the development of Indonesia's fragmented party system after the 1998 reform era and its impact on the quality of public representation in democracy. The multiparty system has increased political participation and broadened societal representation; however, it has also created political fragmentation in parliament that affects government stability and policymaking effectiveness. This research aims to analyze the development of the party system and its influence on political representation and government effectiveness in Indonesia. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through library research. Data were collected from journals, books, official documents, legislation, and election results, and analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings show that the multiparty system expands political representation, but also leads to pragmatic coalitions, weakened party ideology, and elite political domination. Party fragmentation makes legislative and policymaking processes more complex, thereby affecting government effectiveness and the quality of representative democracy in Indonesia.

Keywords: Party System; Political Fragmentation; Multiparty System; Political Representation, Democracy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan demokrasi tersebut, partai politik memiliki peranan penting sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, penyalur aspirasi rakyat, serta penghubung antara pemerintah dan warga negara melalui mekanisme pemilihan umum (Eko Wibowo et al., 2024).

Sistem kepartaian merupakan pola hubungan dan interaksi antarpolitical dalam suatu negara yang mencakup jumlah partai, kekuatan politik, serta perannya dalam proses pemerintahan. Keberadaan sistem ini dipengaruhi oleh konstitusi, sistem pemilu, budaya politik, dan dinamika sejarah politik suatu bangsa. Dalam praktik demokrasi, sistem kepartaian memiliki peranan penting sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum serta menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (KPU Yalimo, 2025). Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dengan diterapkannya sistem multipartai yang memberikan kebebasan lebih luas kepada masyarakat untuk membentuk partai politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah partai politik terus meningkat dan melahirkan sistem kepartaian yang terfragmentasi. Sistem kepartaian yang terfragmentasi ditandai dengan banyaknya partai politik yang memiliki kekuatan relatif seimbang sehingga tidak terdapat satu partai dominan dalam pemerintahan maupun parlemen. Keadaan ini berdampak pada terbentuknya koalisi besar dalam pemerintahan serta meningkatnya kompromi politik antarpolitical (Mayang, 2025).

Pasca reformasi, perkembangan sistem multipartai di Indonesia memberikan ruang representasi politik yang lebih luas bagi masyarakat karena berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik. Namun, di sisi lain, banyaknya partai politik juga menimbulkan persaingan politik yang semakin kompleks dan memengaruhi stabilitas pemerintahan. Banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan kekuatan politik tersebar sehingga proses pengambilan kebijakan sering kali membutuhkan koalisi besar untuk memperoleh dukungan mayoritas. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan parliamentary threshold sebagai upaya penyederhanaan partai politik di parlemen guna menciptakan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan efektivitas demokrasi (Yuda Adiwira, 2020). Pada Pemilu 2024, terdapat 18 partai politik nasional peserta pemilu, namun hanya delapan partai yang berhasil lolos ke DPR RI karena memenuhi ambang batas parlemen 4%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia masih mengalami fragmentasi politik yang cukup tinggi, sehingga memengaruhi dinamika pemerintahan dan representasi politik masyarakat. (Bunga Putri Nauli, 2024).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin berkembangnya sistem kepartaian yang terfragmentasi di Indonesia pasca reformasi yang berdampak terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi rakyat. Banyaknya partai politik yang terlibat dalam parlemen menyebabkan proses pengambilan kebijakan menjadi lebih kompleks karena pemerintah harus membangun koalisi besar untuk memperoleh dukungan politik. Di sisi lain, fragmentasi partai juga memunculkan kecenderungan politik pragmatis, lemahnya ideologi partai, serta meningkatnya dominasi elite politik dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fungsi partai politik sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi di Indonesia (Windawati Pinema et al., 2024).

Penelitian mengenai sistem kepartaian yang terfragmentasi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Okta Yuda

Adiwira pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penerapan *parliamentary threshold* bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen guna menciptakan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan efektivitas demokrasi. Banyaknya partai politik dalam parlemen dinilai menyebabkan proses politik dan pengambilan kebijakan menjadi kurang efektif sehingga diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian (Yuda Adiwira, 2020). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia memiliki hubungan erat dengan kualitas representasi rakyat dan efektivitas sistem presidensial. Fragmentasi partai politik memang dapat memperluas representasi masyarakat karena berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik, namun di sisi lain kondisi tersebut juga memunculkan koalisi pragmatis, lemahnya ideologi partai, serta meningkatnya dominasi kepentingan elite politik dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan representasi rakyat di Indonesia (Windawati Pinema et al., 2024).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas fragmentasi sistem kepartaian dari sisi stabilitas pemerintahan, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan kualitas representasi rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana perkembangan sistem multipartai pasca reformasi memengaruhi pola penyaluran aspirasi masyarakat, pembentukan koalisi politik, serta dominasi elite partai dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dinamika sistem kepartaian Indonesia pada periode politik terkini pasca Pemilu 2024 yang masih menunjukkan tingginya tingkat fragmentasi partai politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara fragmentasi partai politik dengan kualitas representasi rakyat serta efektivitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan sistem kepartaian yang terfragmentasi di Indonesia serta sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi kualitas representasi rakyat dalam sistem demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem kepartaian yang terfragmentasi di Indonesia dan mengkaji dampaknya terhadap representasi rakyat dalam sistem demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh fragmentasi partai terhadap efektivitas pemerintahan, pola koalisi politik, serta kualitas penyaluran aspirasi masyarakat di parlemen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat fragmentasi partai politik di parlemen, maka semakin kompleks proses representasi rakyat dan pengambilan kebijakan dalam pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian politik mengenai sistem kepartaian di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan partai politik dalam memperkuat kualitas demokrasi dan representasi rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji perkembangan sistem kepartaian yang terfragmentasi serta dampaknya terhadap representasi rakyat di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan hasil pemilu yang berkaitan dengan sistem multipartai di Indonesia. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada perkembangan sistem kepartaian pascareformasi hingga Pemilu 2024 serta pengaruh fragmentasi partai politik terhadap efektivitas representasi rakyat di parlemen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dari berbagai sumber akademik dan lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Definisi

operasional penelitian ini mencakup sistem kepartaian terfragmentasi sebagai kondisi banyaknya partai politik dengan distribusi suara yang tersebar dalam pemilu, sedangkan representasi rakyat dipahami sebagai kemampuan lembaga perwakilan dan partai politik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh sehingga dapat menjelaskan hubungan antara fragmentasi sistem kepartaian dan representasi politik di Indonesia (Mahlil Adriaman, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah reformasi tahun 1998. Pada masa Orde Baru, sistem kepartaian cenderung sederhana dan didominasi oleh kekuatan politik tertentu, sedangkan pascareformasi Indonesia menerapkan sistem multipartai yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik sebagai sarana partisipasi demokrasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah partai politik peserta pemilu pada setiap periode pemilihan umum. Pada Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik peserta pemilu, sedangkan pada Pemilu 2024 terdapat 18 partai politik nasional peserta pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia berkembang secara dinamis sebagai bentuk keterbukaan politik dalam demokrasi pascareformasi. Namun, banyaknya partai politik juga menyebabkan fragmentasi kekuatan politik di parlemen karena suara pemilih tersebar ke berbagai partai politik sehingga tidak terdapat partai dominan dalam pemerintahan. Fragmentasi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya institusionalisasi partai politik, kuatnya politik pragmatis, rendahnya loyalitas kader, serta munculnya partai-partai baru yang berbasis kepentingan elite politik tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia berhasil memperluas ruang representasi politik masyarakat, tetapi di sisi lain memunculkan tantangan terhadap efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik nasional (Solihah et al., 2018).

Fragmentasi partai politik dalam demokrasi Indonesia terlihat dari banyaknya partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sehingga kekuatan politik tersebar dan tidak terpusat pada satu partai dominan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus membangun koalisi politik untuk memperoleh dukungan mayoritas dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koalisi dalam sistem multipartai di Indonesia cenderung bersifat pragmatis karena lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek dibandingkan kesamaan ideologi partai. Koalisi politik yang terbentuk juga cenderung mudah berubah mengikuti dinamika politik nasional dan kepentingan elite partai politik. Banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan proses legislasi menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan kepentingan antarpolitical partai politik dalam pembahasan kebijakan publik. Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilitas hubungan dengan partai-partai koalisi agar kebijakan yang dirancang tetap memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai memang mampu memperluas representasi politik masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik apabila tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan partai dan sistem koalisi yang solid (Zamzami Ahmad, 2022).

Tingkat fragmentasi partai politik di Indonesia juga dapat dilihat dari kecenderungan meningkatnya jumlah partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen pada setiap periode pemilu pascareformasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik masyarakat tersebar pada berbagai partai politik dengan latar belakang ideologi, kepentingan, dan basis massa yang berbeda. Dalam praktiknya, fragmentasi politik menyebabkan tidak adanya partai politik yang mampu mendominasi parlemen secara penuh sehingga pemerintahan harus dibangun melalui koalisi multipartai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini

mencerminkan tingginya pluralitas politik dalam demokrasi Indonesia, namun di sisi lain juga memperlihatkan lemahnya konsolidasi partai politik dalam membangun kekuatan politik yang stabil. Fragmentasi tersebut menyebabkan arah kebijakan pemerintah sering dipengaruhi oleh kompromi politik antarpolitical sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih panjang dan kompleks. Kondisi ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa sistem multipartai dalam sistem presidensial berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik apabila tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan partai politik dan budaya demokrasi yang matang (Akhmad et al., 2025).

Sistem kepartaian yang terfragmentasi memberikan dampak langsung terhadap kualitas representasi rakyat dalam demokrasi Indonesia. Partai politik pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, pendidikan politik, serta penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Namun, dalam praktik demokrasi multipartai di Indonesia, banyak partai politik lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis dan perebutan kekuasaan dibandingkan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Politik pragmatis tersebut terlihat dari pola koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan elite partai dan pembagian kekuasaan, bukan berdasarkan kesamaan ideologi atau program politik. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat sering kali tidak tersalurkan secara optimal karena partai politik lebih fokus menjaga stabilitas koalisi dan kepentingan internal partai. Selain itu, tingginya fragmentasi partai juga memengaruhi kualitas demokrasi karena proses pengambilan kebijakan menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Fragmentasi sistem kepartaian memang mampu memperluas representasi politik masyarakat, tetapi apabila tidak diimbangi dengan penguatan ideologi dan kelembagaan partai politik, maka kualitas demokrasi representatif di Indonesia akan sulit berkembang secara efektif (M. Reza Saputra et al., 2024).

Di sisi lain, Fragmentasi sistem kepartaian dalam pemerintahan presidensial Indonesia juga memberikan dampak terhadap efektivitas pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik. Banyaknya partai politik di parlemen menyebabkan pemerintah harus membangun dukungan politik melalui koalisi besar agar kebijakan yang diajukan dapat disetujui oleh DPR. Kondisi tersebut sering menimbulkan hambatan dalam proses legislasi karena adanya perbedaan kepentingan antarpolitical yang terlibat dalam koalisi pemerintahan. Selain itu, sistem multipartai juga menyebabkan fungsi oposisi di parlemen menjadi kurang efektif karena sebagian besar partai politik cenderung bergabung ke dalam koalisi pemerintah demi memperoleh posisi politik tertentu. Akibatnya, mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi lemah dan kontrol politik terhadap kebijakan pemerintah tidak berjalan secara maksimal. Dalam sistem presidensial multipartai, kompromi politik menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, namun kompromi tersebut sering kali lebih mengutamakan kepentingan elite politik dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa fragmentasi partai politik tidak hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga berdampak pada efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi demokrasi dan pelayanan publik secara optimal (Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., 2023).

Selain itu, Fragmentasi partai politik juga memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam sistem multipartai, kebijakan pemerintah sering kali harus disesuaikan dengan kepentingan partai-partai koalisi sehingga orientasi kebijakan tidak selalu sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan proses perumusan kebijakan publik menjadi lebih kompromistis dan rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik antarpolitical. Selain itu, partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan

cenderung lebih fokus menjaga stabilitas politik dibandingkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Akibatnya, mekanisme checks and balances dalam demokrasi menjadi kurang efektif karena fungsi oposisi di parlemen tidak berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi sistem kepartaian memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia (Akhmad et al., 2025).

Upaya penguatan sistem kepartaian di Indonesia perlu dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil serta meningkatkan kualitas demokrasi dan representasi rakyat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kelembagaan partai politik melalui peningkatan kaderisasi, konsolidasi organisasi, dan penguatan ideologi partai agar partai politik tidak hanya berorientasi pada kepentingan pragmatis semata (Awang et al., 2024). Selain itu, penyederhanaan sistem multipartai juga menjadi bagian penting dalam mengurangi fragmentasi politik di parlemen sehingga proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Penyederhanaan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan *parliamentary threshold* secara konsisten sebagai instrumen untuk membatasi jumlah partai politik di parlemen dan menciptakan stabilitas pemerintahan, meskipun kebijakan ini juga dinilai dapat membatasi peluang partai kecil dalam memperoleh representasi politik (Yuda Adiwire, 2020). Di sisi lain, penguatan pendidikan politik juga diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi dan fungsi partai politik dalam sistem pemerintahan. Partai politik juga perlu memperkuat demokrasi internal melalui proses rekrutmen dan pengambilan keputusan yang transparan serta partisipatif agar mampu menghasilkan kader politik yang berkualitas dan berintegritas (Nurhalimah, 2026). Dengan demikian, penguatan sistem kepartaian di Indonesia tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih representatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem kepartaian di Indonesia pascareformasi 1998 menunjukkan perubahan signifikan dari sistem sederhana menuju sistem multipartai yang lebih terbuka dan demokratis. Sistem ini berhasil memperluas partisipasi dan representasi politik masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan fragmentasi politik di parlemen. Fragmentasi tersebut ditandai dengan tersebarnya kekuatan politik pada banyak partai sehingga tidak muncul dominasi tunggal dalam pemerintahan, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya koalisi multipartai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kompleksitas proses politik, terutama dalam pengambilan kebijakan publik, proses legislasi, serta pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen. Koalisi yang bersifat pragmatis dan berbasis kepentingan elite politik turut melemahkan efektivitas oposisi serta mekanisme *checks and balances*, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan menjadi kurang optimal. Selain itu, fragmentasi sistem kepartaian juga berpengaruh terhadap kualitas representasi rakyat karena aspirasi masyarakat sering kali tereduksi oleh kepentingan politik partai dalam koalisi. Oleh karena itu, penguatan sistem kepartaian menjadi kebutuhan penting melalui konsolidasi kelembagaan partai, penguatan ideologi, penyederhanaan sistem multipartai, penerapan *parliamentary threshold*, serta peningkatan pendidikan politik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi yang lebih efektif, representatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S., Muhammad, K., Meylinda, P., & Elviandri, E. (2025). Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3148>
- Awang, E., Putra, M., Hukum, F., Bumigora, U., & Barat, N. T. (2024). *Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia*. 9(December), 423–449.
- Bunga Putri Nauli. (2024). *Hasil Pemilu 2024: 8 Parpol Lolos ke DPR*. Bawaslu.Go.Od. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/19441191/hasil-pemilu-2024-8-parpol-lolos-ke-dpr>
- Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M. H. (2023). Terhadap Pembentukan Kabinet Profesional (Zaken Kabinet) Di Indonesia. *Knaphtn-Htn*, 1(1), 1020. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/35/36>
- Eko Wibowo, Ismail, & Hartana. (2024). Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 257–270. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>
- KPU Yalimo. (2025). *Sistem Kepartaian dalam Demokrasi: Dari Satu Partai hingga Multi Partai*. KPU Yalimo. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8947_sistem-kepartaian-dalam-demokrasi-dari-satu-partai-hingga-multi-partai
- M. Reza Saputra, Wicipto Setiadi, & Ahmad Ahsin Thohari. (2024). Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531>
- Mahlil Adriaman. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Anna Andriany Siagian (Ed.); 1st ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metode_Penelitian_Ilmu_Hukum/Lu f4EAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Mayang, I. W. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Dinamika Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi. *Arus Jurnal Sosial Dan Huaniora*, 5, 267–272. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Nurhalimah, E. (2026). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik The Role Of Political Parties In Providing Political Education Based On Law Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu. *Kolaborasi Sains*, 9(1), 1561–1576. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10321>
- Solihah, R., Rahmatunnisa, M., & Witianti, S. (2018). Fenomena Fragmentasi Partai politik Versus penerapan Parliamentary Thershold Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 14(1).
- Windawati Pinema, Arpani, P., & Nurainun. (2024). Pengelolaan Pilkada Pada Sistem Multipartai: Sebuah Tinjauan Terhadap Pelembagaan Partai Politik. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 203–222.
- Yuda Adiwira, O. (2020). Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Sol Justicia*, 3(2), 227–248. <https://www.neliti.com/id/publications/408578/implikasi-parliamentary-threshold-terhadap-sistem-kepartaian-di-indonesia>
- Zamzami Ahmad, Q. A. (2022). Fragmentasi Politik Reposisi Partai dalam Pencarian Format Ideal Pasca Reformasi. *Jurnal Supremasi*, 12(013), 79–93.